

# Pemanfaatan *Electronic Data Interchange*(EDI) Pabean Guna Mengetahui Efektifitas dan Efisiensi Kerja pada PT. Heru Rahayu Surabaya

Suharso<sup>a</sup>, Narto, A<sup>b</sup>, Umaroh, A.K<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Dosen Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Politeknik Ilmu Pelayaran, Semarang,

<sup>b</sup>Dosen Program Teknik Politeknik Ilmu Pelayaran, Semarang,

<sup>c</sup> Taruna(NIT.50135048.K) Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Politeknik Ilmu Pelayaran, Semarang.

**Abstraksi-Kebijakan** menerapkan sistem *Electronic Data Interchange*(EDI) merupakan suatu sistem berbasis elektronik. Kebijakan ini adalah sarana pelayanan dokumen dan data kepabeanaan yang terintegrasi dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan EDI, kendala, dan upaya yang ditempuh PT. Heru Rahayu Surabaya menunjang efektifitas dan efisiensi kerja.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumen. Lokasi yang dipilih adalah kantor PT. Heru Rahayu Surabaya dan kantor KPBC Tanjung Perak. Metode pemaparan menggunakan *Urgency, Seriousness, Growth* (USG).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem EDI mempermudah proses *customs clearance* pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), mengurangi *human error* dan mengurangi penggunaan kertas dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam kualitas dan kuantitas produk jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan keuntungan perusahaan. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan seperti kendala teknis dan kesalahan dari SDM, diatasi dengan merekrut karyawan yang ahli di bidang kepabeanaan dan memberikan latihan kepada karyawan perusahaan.

**Kata kunci:** *Pengurusan impor-ekspor, sistem EDI, kepabeanaan*

## I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepabeanaan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) dihadapkan pada suatu dilema. Disatu sisi untuk melaksanakan fungsi pemungutan pajak negara dalam bentuk pemungutan bea masuk atas barang impor dan pengawasan lalu lintas barang di wilayah pabean Republik Indonesia, administrasi pabean harus melakukan pemeriksaan pabean seakurat mungkin. Disisi lain untuk memperlancar arus barang, intervensi administrasi pabean dalam melakukan pemeriksaan barang harus dilakukan seminimal mungkin.

Untuk mengatasi dilema tersebut, administrasi pabean diharapkan dapat memberikan fasilitas perdagangan dalam bentuk mempercepat pelayanannya sehingga akan mempercepat arus barang dan dokumen namun tanpa mengurangi kewaspadaan dalam mengamankan hak negara dari kemungkinan tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan kepabeanaan dengan sistem EDI, administrasi pabean dapat memproses pemberitahuan pabean PIB dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam sistem komputer. Pengguna jasa kepabeanaan antara lain: perusahaan pelayaran, importir, eksportir, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK). PIB dan PEB ditransmit secara elektronik, sehingga data yang

sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jendral Bea dan Cukai tanpa melalui proses *re-entry*. Dalam proses *re-entry* tersebut mungkin dapat terjadi *human error* seperti kesalahan pengetikan data, selain itu juga menambah waktu pengerjaan.

Secara fundamental, diberlakukannya sistem EDI dalam prosedur kepabeanaan di Tanjung Perak Surabaya merupakan salah satu upaya pemerintah, dalam hal ini DJBC untuk memanfaatkan teknologi informasi guna melakukan efisiensi pelayanan yang diberikan. Penggunaan teknologi EDI Pabean di PT. Heru Rahayu Surabaya sangat berpengaruh pada keseluruhan kegiatan *custom clearance*, PT. Heru Rahayu Surabaya sebagai PPJK sudah menggunakan sistem EDI, tetapi masih terdapat beberapa staff yang kurang siap dalam penggunaan dan pengoperasionalan sistem EDI sehingga terjadi beberapa kali masalah seperti *reject* dokumen, dan blokir dokumen.

Dengan mencermati latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang meliputi:

1. Mengapa penggunaan EDI Pabean dibutuhkan oleh PT. Heru Rahayu Surabaya?
2. Kendala apa saja yang dialami PT. Heru Rahayu Surabaya dalam penggunaan EDI Pabean?
3. Apa yang ditempuh PT. Heru Rahayu Surabaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan EDI Pabean untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kerja?

Mengacu kepada rumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana sistem EDI dibutuhkan di PT. Heru Rahayu Surabaya, kendala apa saja yang dialami dan upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam penggunaan sistem EDI di PT. Heru Rahayu Surabaya.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Kepabeanaan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.[1]

#### 2. *Harmonized System*(HS Code)

Suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya.[2]

#### 3. *Indonesia National Single Windows* (INSW)

Sebuah sistem yang melakukan integrasi informasi yang berkaitan dengan proses penanganan dokumen

kepercayaan dan pengeluaran barang yang menjamin keamanan data dan informasi.[3]

#### 4. Electronic Data Interchange

Pertukaran informasi bisnis antar aplikasi-antar perusahaan secara elektronik menggunakan standar yang disepakati bersama.[4]

#### 5. Pengertian Customs Clearance

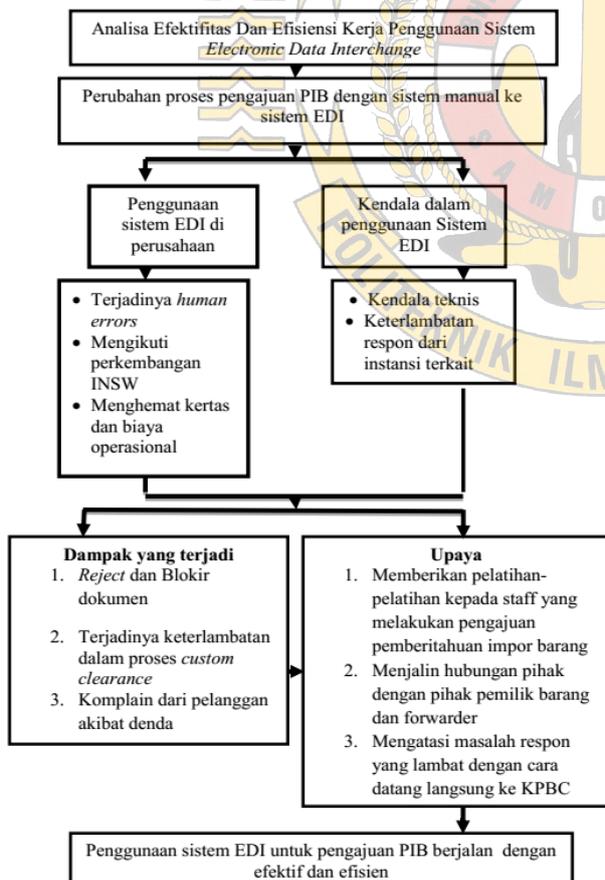
Penyelesaian dan pengurusan berbagai dokumen administrasi, biaya pajak dan hal terkait lainnya atas suatu barang ekspor ataupun barang impor sampai dengan tahap dikeluarkannya surat persetujuan untuk mengeluarkan barang tersebut.[5]

#### 7. Efektifitas dan Efisiensi Kerja

Keadaan dimana suatu aktifitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai dengan yang dihendaki, perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara keuntungan dengan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang digunakan dalam pelaksanaan, seperti halnya juga maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.[6]

### B. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk dapat memaparkan pembahasan penelitian ini, peneliti membuat suatu kerangka pemikiran terhadap hal-hal yang menjadi pembahasan mengenai masalah penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

### III. METODOLOGI

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga *survey normative*. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah *normative* bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Prespektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

Menerangkan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).[7]

Kerja peneliti, bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara. Alat yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah USG (*urgency, seriousness, growth*). Metode ini efektif dalam menemukan inti permasalahan karena memastikan bahwa suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian yang ditimbulkan tidak berasal pada satu titik penyebab permasalahan namun diambildari beberapa kemungkinan yang ada.

#### B. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian tentang penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB ketika penulis melaksanakan praktek darat (prada) di PT. Heru Rahayu Surabaya pada bulan Juli 2015 sampai dengan Oktober 2016 kurang lebih selama tiga bulan.

#### C. Teknik Analisa Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi serta mengumpulkan data serta dokumen-dokumen yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bersifat kualitatif, untuk itu akan dilakukan penilaian prioritas masalah dari yang paling mendesak hingga tidak terlalu mendesak dengan menggunakan teknik analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG). USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat kegawatan, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian *urgency, seriousness, dan growth* dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Urgency

Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu

tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.

2. *Seriousness*

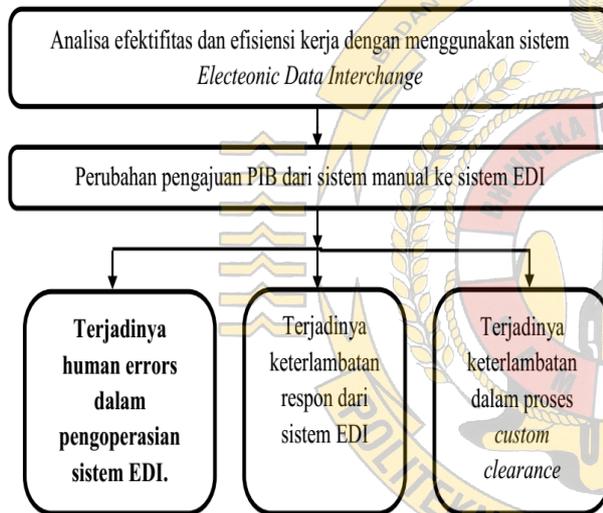
Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.

3. *Growth*

Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk. Apabila tidak diatasi akan menimbulkan masalah yang baru dalam jangka panjang.

Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik *scoring*. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pohon masalah



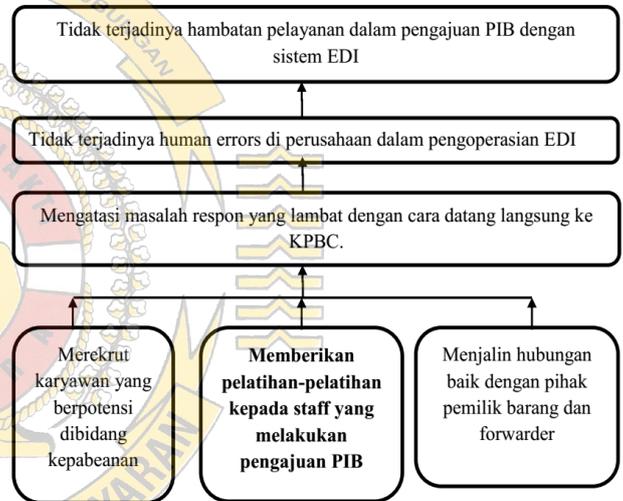
Gambar 2. Pohon Masalah

c. Pemilihan Spesifikasi Prioritas Masalah

Tabel 2. PemilihanSpersifikasiPriotitas Masalah

No	Alternatif Masalah	Nilai Perbandingan		Penilaian / Kriteria				Prioritas
				U	S	G	R	
1.	Merekrut karyawan yang berpotensi di bidang pabean.	1 - 2 1 - 3	2 1	3	4	3	10	II
2.	Memberikan pelatihan-pelatihan kepada staff yang melakukan pengajuan pemberitahuan impor barang	2 - 1 2 - 3	2 2	5	5	4	24	I
3.	Menjalin hubungan baik dengan pihak pemilik barang dan forwarder	3 - 1 3 - 2	1 2	3	3	3	9	III

d. Pohon Alternatif



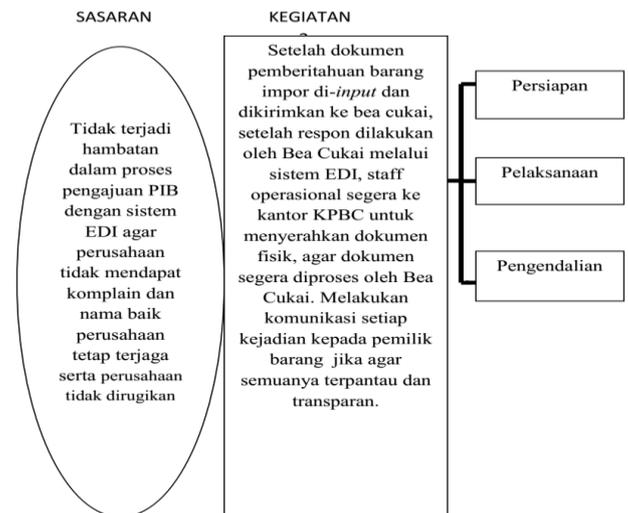
Gambar 3. Pohon Alternatif

b. PemilihanMasalahPokokPriotitas

Tabel 1. PemilihanMasalahPokokPriotitas

No	Alternatif Masalah	Nilai Perbandingan		Penilaian / Kriteria				Prioritas
				U	S	G	R	
1.	Terjadinya human errors dalam mengoperasika n sistem Electronic Data Interchange.	1 - 2 1 - 3	1 1	5	5	5	15	I
2.	Terjadinya keterlambatan respon dari sistem electronic data interchange	2 - 1 2 - 3	1 2	5	4	4	13	II
3.	Terjadinya keterlambatan dalam proses custom clearance	3 - 1 3 - 2	1 2	2	3	2	8	III

5. Matriks Rincian Kerja



Gambar 4. Matris Rincian Kerja

#### IV. DISKUSI

##### A. Hasil Penelitian

###### 1. Alasan Perusahaan Menggunakan Sistem EDI

Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu penulis kemukakan data-data temuan masalah. Dari observasi, peneliti mencatat tentang segala sesuatu tentang cara pengoperasian sistem pada PT. Heru Rahayu Surabaya. Dalam suatu kesempatan wawancara dengan direktur PT. Heru Rahayu Surabaya, Bapak Heri Siswanto. Didapat informasi mengapa perusahaan ini secara bertahap mulai menerapkan sistem EDI yang dimulai sejak tahun 2005. Masih menurut Bapak Heri Siswanto, penerapan sistem baru di perusahaan ini menimbulkan beberapa konsekuensi. Pertama, PT. Heru Rahayu Surabaya ini harus mempunyai komputer dan perangkat IT pendukungnya yang berspesifikasi khusus dan harus membeli lalu menginstal aplikasi EDI. Yang kedua, perusahaan ini harus memberikan fasilitas diklat atau pelatihan-pelatihan khusus tentang kepabeanan dan penggunaan sistem EDI untuk para pegawainya.

Saat melakukan wawancara, peneliti diberitahu tentang bagaimana struktur organisasi perusahaan dan beberapa dokumen-dokumen kepabeanan seperti, B/L, *invoice*, *packing list*, *insurance*, *certificate of origin* (COO), dokumen karantina dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu para staff lain di perusahaan tersebut membantu penulis untuk meng-*entry* data.

Dengan perubahan penggunaan sistem EDI Pabean dalam proses pengajuan PIB, membuat batas limit pengurusan dokumen kepabeanan juga berubah. Dengan sistem EDI hanya butuh waktu kurang lebih 4 jam, sebelumnya butuh waktu 5-7 hari. Sehingga hal ini akan mempercepat kelancaran arus barang dan dokumen.

EDI kepabeanan adalah suatu sistem pertukaran dokumen elektronik yang dikembangkan oleh DJBC untuk penyampaian dokumen pabean secara elektronik memanfaatkan jaringan EDI. Setiap pengguna jasa EDI akan diberi *mailbox* yang memiliki identifikasi khusus disebut EDI *number* dan *password* yang berfungsi sebagai identitas/alamat pengguna jasa serta menjamin keamanan transaksi dokumen.

Menurut ahli kepabeanan di perusahaan tersebut Bapak Rasmino Moerjandono pada penyerahan pengajuan PIB dari manual menjadi menggunakan sistem EDI mempermudah PT. Heru Rahayu dalam proses pengajuan *customs clearance* barang impor. Adapun beberapa manfaat dari sistem EDI Pabean yang digunakan pada PT. Heru Rahayu Surabaya adalah :

- a. Mampu mengikuti perkembangan INSW
- b. Mengurangi penggunaan kertas dan biaya operasional
- c. Mempercepat pelayanan pemberitahuan dan pemrosesan barang
- d. Mengurangi *human errors*
- e. Meninggalkan sistem birokrasi yang rumit
- f. Menambah pengetahuan pengguna jasa dan sistem komputerisasi

###### 2. Kendalayang Ditemukan

Dalam proses pengoperasian sistem EDI, ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Pengoperasian EDI di PT. Heru Rahayu ternyata tidak dapat dilakukan semua orang. Hanya satu orang staff saja yang mampu

menggunakan sistem EDI dengan baik yaitu Bapak Berry Karundeng. Staff lain yang diajari oleh Bapak Berry.

Selama peneliti melaksanakan praktek darat di PT. Heru Rahayu Surabaya, penulis menemukan beberapa masalah lain pada efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sistem EDI. Dimana dalam setiap kali mengirimkan PIB dengan menggunakan sistem EDI selalu terjadi ketidاكلancaran yang diakibatkan keterlambatan respon dari pihak Bea Cukai. Seringnya terjadi hal demikian tentu sangatlah mengganggu kelancaran impor barang.

Sebelum menggunakan sistem EDI Pabean dalam pengajuan PIB PT. Heru Rahayu Surabaya masih menggunakan sistem manual atau pemberitahuan umum yaitu dengan cara datang langsung ke KPBC dengan menyerahkan dokumen PIB, B/L, *invoice*, *packing list*, *insurance*, dan dokumen pendukung lainnya.

Bapak Berry Karundeng, mengatakan bahwa penerapan sistem EDI di PT. Heru Rahayu belum dalam kondisi yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari karyawan yang belum mampu mengoperasikan sistem EDI tersebut dengan baik. Sehingga hal ini mengakibatkan kendala-kendala yang menghambat dalam proses pengoperasian sistem EDI, seperti:

- a. Kendala teknis, yaitu yang berhubungan dengan transfer data melalui komputer, fasilitas internet, fasilitas telepon dan biaya untuk pengadaan perangkat komputer.
- b. Adanya penambahan dokumen untuk pengajuan PIB
- c. Adanya karyawan yang belum mahir dalam mengoperasikan komputer dan sistem EDI

###### 3. Upaya yang ditempuh PT. Heru Rahayu Surabaya

Melihat kendala yang terjadi seperti yang telah penulis uraikan di atas, pihak manajemen PT. Heru Rahayu Surabaya merasa resah terhadap komplain dari pelanggan. Komplain tersebut antara lain adalah: keterlambatan dalam proses *customs clearance*, keterlambatan ini disebabkan karena seringnya karyawan yang salah dan tidak paham dalam pengajuan PIB dengan sistem EDI sehingga terjadi kerugian dalam perusahaan. Kemudian atas persetujuan dari beberapa pihak, PT. Heru Rahayu Surabaya memutuskan untuk melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi masalah yang timbul dalam penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB seperti penambahan tenaga kerja, dan penambahan fasilitas internet.

Menurut kepala operasional Bapak Anugrah Dian, PT. Heru Rahayu harus memberikan pelatihan kepada staff yang sudah ada tentang sistem EDI dan jika perlu menambah staff yang berkopeten dan handal dibidang kepabeanan dan komputer.

##### B. Pembahasan Masalah

###### 1. Sistem *Electronic Data Interchange (EDI)* Pabean dibutuhkan oleh PT. Heru Rahayu Surabaya

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperlancar arus barang dan dokumen DJBC telah menerapkan EDI dalam prosedur kepabeanan. Pada tahap awal penerapan EDI diterapkan dalam bidang impor yang meliputi prosedur pengangkutan serta pengajuan PIB. Untuk sistem pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Menurut *website* PT. EDI Indonesia Pelayanan jasa kepabeanan secara elektronik di Surabaya telah dimulai

sejak 15 Mei 1995 dengan dibukanya jasa EDI Surabaya oleh PT. EDI Indonesia sesuai dengan rencana DJBC.

Modernisasi pelayanan kepabeanan dengan perubahan sistem pengajuan PIB yang dulunya menggunakan sistem manual menjadi secara elektronik yaitu dengan sistem EDI adalah agar pertukaran data lebih optimal dimana berdasarkan tuntutan dari berbagai pihak yang menuntut akan kecepatan pengurusan dibidang kepabeanan. Dengan adanya sistem EDI ini, maka memungkinkan para pengguna jasa untuk pengajuan PIB dan dokumen pabean lainnya tanpa mendatangi KPBC. Hanya perlu dengan sebuah komputer yang dilengkapi dengan internet dan memakai sebuah sistem aplikasi EDI Pabean, maka pihak PPJK sudah dapat melakukan pemberitahuan PIB. Sistem EDI dibutuhkan oleh PT. Heru Rahayu Surabaya, karena :

a. Mengikuti perkembangan INSW

Dengan menggunakan sistem EDI maka secara tidak langsung PT. Heru Rahayu Surabaya dapat menggunakan portal INSW dan mengetahui bagai mana modernisasi sistem kepabeanan.

INSW merupakan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan Internet (*public-network*). INSW akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor-impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. INSW meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor-impor.

b. Mengurangi Penggunaan kertas dan biaya operasional

Penggunaan kertas dalam birokrasi penyerahan PIB lebih berkurang. Sistem kerja dengan menggunakan sistem *Papperless* (penggunaan kertas berkurang), data-data dan dokumen kepabeanan hanya diproses dengan menggunakan media elektronik yaitu dengan memakai komputer. Kemudian dengan sistem EDI yang didukung dengan internet, data yang sudah *di-input* dikirimkan kepada pihak yang terkait dan pihak Bea dan Cukai, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk operasional berkurang.

Tabel 3. Perbandingan biaya operasional pengajuan PIB sistem EDI dan sistem manual

No	Biaya Operasional	Sistem EDI		Sistem Manual		Keterangan
		Efektif	Efisien	Efektif	Efisien	
1	<i>under table</i>	√	√	-	-	Tercapai
2	Biaya Makan	√	√	√	-	Tercapai
3	Biaya lembur	√	√	-	-	Tercapai
4	Biaya BBM	√	√	-	-	Tercapai
5	Biaya Kirim	√	√	-	-	Tercapai
6	Biaya Listrik	√	√	-	√	Tercapai
7	Biaya Foto Copy	√	√	-	-	Tercapai
8	Biaya Internet	√	√	√	√	Tercapai
9	Biaya Telpon	√	√	√	√	Tercapai

c. Mempercepat pelayanan pemberitahuan dan pemrosesan barang

Dengan penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB ini, maka pemberitahuan respon status dokumen PIB dan dokumen kepabeanan lainnya semakin cepat dan pelayanan respon SPPB dari pihak KPBC semakin cepat dan pihak PPJK langsung dapat memproses

untuk kegiatan selanjutnya yaitu pengiriman barang dan tentunya tidak terlalu memakan banyak waktu dan biaya yang digunakan untuk operasional pengurusan barang impor semakin sedikit.

Tabel 4. Perbandingan Indikator dari Sistem EDI dan Sistem Manual

No	Indikator	Sistem EDI	Sistem Manual	Efektif	Efisien
1	Kecepatan	4 Jam	5-7 hari	EDI	EDI
2	Keakuratan	memiliki ECC (Error Correction Control)	adanya entry data ulang	EDI	EDI
3	Keamanan	Tidak bisa dipalsukan	Dapat Dipalsukan	EDI	EDI

d. Mengurangi *human errors*

Penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB ke KPBC akan mengurangi adanya *human errors*. Dikarenakan sudah ada sistem yang pasti dan ketentuan tentang setiap pelanggaran atau kesalahan yang kemudian mengharuskan pengguna sistem EDI untuk benar benar teliti dan sungguh-sungguh dalam pekerjaan dan pengoperasian pengisian data.

e. Menambah pengetahuan penggunaan jasa dan sistem komputerisasi

Dengan penggunaan sistem EDI diperusahaan, maka pengetahuan karyawan tentang penggunaan jasa dan komputerisasi menjadi semakin bertambah dan berkembang. Dikarenakan pertukaran data elektronik yang harus menggunakan komputer dan fasilitas internet untuk melakukan pelayanan, maka para karyawan tersebut mau tidak mau harus mengetahui bagaimana cara menggunakan komputer dan internet terutama pada aplikasi EDI.

2. Kendala yang Dialami PT. Heru Rahayu Surabaya dalam Penggunaan Sistem *Electronic Data Interchange* (EDI) Pabean

Penerapan yang diwajibkan bagi semua pihak PPJK pada untuk merubah sistem penyerahan dokumen PIB dari cara manual ke sistem PDE dengan menggunakan sistem EDI, tidak hanya berdampak positif saja. Beberapa ketentuan yang diatur, pihak KPBC menuntut adanya kesempurnaan dalam tatacara penyerahan dokumen dengan sistem tersebut. Kesalahan penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB dalam perusahaan pasti akan terjadi, karena pengetahuan pengguna akan sistem EDI ini masih minim. Kendala-kendala dalam proses jalannya proses pemberitahuan dokumen pabean ini dapat menyebabkan pekerjaan perusahaan menjadi tidak efektif dan efisien. Dimana kendala-kendala tersebut dapat mengakibatkan proses penundaan pengurusan *customs clearance* dan *delivery cargo*,

a. Kendala teknis

Kendala teknis yang dialami PT. Heru Rahayu Surabaya yaitu yang berhubungan dengan pentransferan data lewat komputer, fasilitas internet, fasilitas telepon dan biaya untuk pengadaan perangkat komputer.

Penggunaan internet dalam proses pengajuan PIB dengan sistem EDI sangat diperlukan bagi PT. Heru Rahayu, akan tetapi ada beberapa waktu dimana koneksi internet didalam perusahaan tidak berjalan dengan lancar, sehingga beberapa kali terjadi keterlambatan dalam pengkomunikasian dokumen ke pihak Bea dan Cukai.

Selain itu juga aliran arus listrik juga menjadi kendala saat terjadi pemadaman listrik, karena dengan sistem EDI yang harus menggunakan komputer jika listrik padam perusahaan harus menunggu sampai listrik kembali menyala.

b. Adanya penambahan dokumen untuk pengajuan PIB

Masih adanya persyaratan yang mengharuskan legalitas surat asli. Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih mengharuskan pengurusan surat keterangan asal (COO) dilampiri dokumen PEB yang telah mendapat legalitas dari Bea dan Cukai. Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum terpasang perangkat yang bisa memantau secara *on-line* dan masih ada beberapa instansi terkait yang belum mampu menerapkan sistem *on-line* secara baik.

Dalam dokumen PIB harus disertakan nomor dan tanggal dokumen fasilitas jika pemilik barang menggunakan fasilitas untuk barang yang diimportnya, seperti, *Certificate Of Origin, Master List, SNI, HS code* dan lain-lain, PPJK harus mengetahui dimana gudang tempat barang impor tersebut ditimbun dengan menunggu dokumen BC.1.1 (*Manifest*), dokumen karantina, dan dokumen BPOM. Dalam hal ini mengharuskan perusahaanbekerjasama baik dengan pihak terkait. Jika dalam suatu dokumen PIB salah satu dokumen tersebut tidak di-*input* maka dokumen PIB akan ditolak atau kena *reject* dan proses pengajuan PIB dalam *customs clearance* akan terhambat.

c. Adanya karyawan yang belum bisa dengan baik mengoperasikan komputer dan sistem EDI

Sering ditemui kerusakan terhadap sistem dan jaringan akibat pemahaman yang kurang tentang komputer beserta komponen-komponennya. Pada saat pengoperasian komputer sering ditemukan karyawan membuka banyak aplikasi selain sistem EDI, sehingga menimbulkan kemacetan (*hang*) yang tidak dapat diatasi kecuali dengan memutus saluran tenaga listrik secara paksa. Akibat mematikan komputer yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada komponen-komponen *hard disk*. Apabila hal tersebut sering terjadi maka tidak menutup kemungkinan seluruh data-data yang tersimpan akan tidak dapat terbaca lagi atau hilang dan akan sangat menghambat proses *customs clearance* melalui sistem EDI. Terjadi kesalahan atau *error* dalam proses penginputan data ke dalam sistem EDI oleh karyawan sehingga mengakibatkan dokumen PIB yang dikirimkan mendapatkan respon *reject* bukan *ready*.

Berikut beberapa contoh lain respon *reject* (penolakan) dari PIB komunikasi:

1) Nomor pengajuan sudah dipakai

Respon *reject* ini terjadi karena pengguna jasa mengirimkan dokumen berulang kali. Terdapat dokumen yang terdahulu yang masih sedang dalam proses validasi namun dikirimkan dokumen baru, maka data yang terakhir dikirim akan mendapat respon *reject*.

2) Kode Pelabuhan tidak terdaftar

Respon *reject* terjadi karena terdapat kode pelabuhan yang tidak dikenal/tidak didalam dokumen. Pihak PPJK harus melakukan perbaikan data dan mengirimkan kembali dokumen pabean.

3) Host BL/AWB PIB tidak sesuai dengan data di BC.11

Terdapat perbedaan antara *house B/L* yang dicantumkan di dokumen PIB dengan data yang terdapat di manifest. Kesalahan terjadi pada penulisan Nomor BL / AWB atau tanggal BL / AWB atau nomor dan tanggal BL / AWB.

4) SKEP Tidak Dikirim Sudah Lewat Waktu Tunggu Penyerahan SKEP 3 hari

Proses dokumen melalui Analyzing Point (AP), maka dimungkinkan petugas AP untuk meminta dokumen pendukung dari pengguna jasa (pengajuan dokumen pendukung). Apabila dokumen pendukung tersebut tidak diserahkan terhitung 3 (tiga) hari dari dikeluarkannya permohonan untuk mengajukan dokumen pendukung maka dokumen akan otomatis di *reject*.

5) Seri HS barang terkena larangan dan batasan (Iartas) Pelabuhan muat tidak sesuai

Terdapat perbedaan antara data yang dicantumkan di dokumen pabean dengan data yang dikirimkan oleh instansi penerbit perijinan. Perbedaan terdapat pada kode pelabuhan muat yang dicantumkan di dokumen PIB dengan kode pelabuhan muat yang dicantumkan di dalam dokumen perijinan. PPJK harus memastikan pengisian kode sudah sesuai dan kirimkan kembali dokumen PIB yang sudah diperbaiki.

6) Kode HS terkena Iartas tidak sesuai dengan item perjanjian

Terdapat perbedaan antara data yang dicantumkan di dokumen pabean dengan dokumen yang dikirimkan oleh instansi penerbit perjanjian. Perbedaan terdapat kode HS yang dicantumkan di dokumen PIB dengan kode HS yang dicantumkan di dalam dokumen perjanjian. Solusinya adalah pihak PPJK harus memastikan pengisian kode sudah sesuai dan kirimkan kembali dokumen PIB yang sudah diperbaiki atau koordinasi dengan instansi penerbit perjanjian untuk perbaikan data perijinan yang dikirim ke portal INSW.

7) Kesalahan kode HS

Respon *reject* terjadi karena terdapat kode HS yang tidak dikenal/tidak didalam dokumen. PPJK harus melakukan perbaikan data dan kirimkan kembali dokumen pabean.

8) Credit Advice (SSPCP) Tidak Ada, Sudah Lewat Waktu Tunggu (1 Hari)

Dokumen pabean yang dikirimkan tidak dapat direkonsiliasikan dengan dokumen pembayaran yang sesuai. Solusinya adalah apabila pembayaran sudah dilakukan cek apakah dokumen SSPCP sudah dikirimkan oleh bank. Apabila sudah dikirim, cek apakah nomor aju pada SSPCP sesuai dengan nomor aju dokumen PIB.

9) Blokir karena masih belum menyerahkan Berkas PIB terdahulu

Terdapat kewajiban penyerahan dokumen pabean yang belum diselesaikan. Solusi : serahkan dokumen pabean ke Bea dan Cukai selanjutnya lanjutkan proses dokumen baru.

10) Salah Tarif

Terdapat kesalahan dalam pencantuman tarif Bea Masuk. Solusi : perbaiki tarif dan perhitungan nilai pajak dan bea masuknya, lalu dokumen dapat dikirimkan kembali

3. Upaya yang ditempuh PT. Heru Rahayu Surabaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan sistem *Electronic Data Interchange* untuk dapat menunjang efektifitas dan efisiensi kerja

Dalam tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal bagi perusahaan dan juga mencapai pengoptimalisasian waktu dan biaya dalam proses penyerahan data dan dokumen PIB pada saat melaksanakan kegiatan *customs clearance* PT. Heru Rahayu Surabaya mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Merekrut karyawan yang ahli di bidang kepabeanandan berkompetensi di bidang komputerisasi. Menjadi perusahaan PPJK yang menggunakan sistem EDI dalam kegiatan kerja, PT. Heru Rahayu mempunyai tuntutan dari sistem dimana pada sistem ini harus memaknai sebuah alat pembantu yaitu komputer yang diisi dengan sebuah aplikasi khusus yaitu EDI Pabean. Untuk pembuatan PIB, maka perusahaan mengatasi kendala tersebut dengan merekrut karyawan yang handal dan trampil dalam penggunaan komputerisasi dan merekrut karyawan yang ahli dalam bidang kepabeanan , karena seorang ahli tersebut sangat dibutuhkan ketika terjadi kendala-kendala seperti di atas.
- b. Memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada staf yang melakukan penyerahan data dan doumen PIB. Sebelum karyawan menggunakan sistem EDI dalam pengoperasiannya untuk bekerja, lebih baik karyawan tersebut diberikan pelatihan-pelatihan atau diklat di KPBC tentang bagaimana penggunaan sistem EDI dalam proses penggunaannya, agar pada saat pengoperasian sistem EDI tersebut karyawan tidak mengalami kesulitan dan kesalahan pada saat penginputan data dan dokumen. Dan kemudian melakukan pengawasan dan pengecekan rutin terhadap kinerja staff yang mengoperasikan sistem EDI.
- c. Mengikuti segala macam perubahan sistem EDI yang di berlakukan oleh pemerintah, jika terjadi seperti *upgrade-an* sistem EDI maka PT. Heru Rahayu Surabaya harus ikut *serta meng-update* sistem EDI pada komputernya.
- d. Melakukan service internet secara rutin agar koneksi internet di dalam perusahaan berjalan dengan lancar, jika perlu diadakan penambahan kuota internet.
- e. Perlunya diadakan penyederhanaan birokrasi dalam proses pengajuan PIB dari pihak KPBC sehingga waktu yang dibutuhkan dalam mengurus segala macam bentuk pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kepabeanan dapat dipersingkat.
- f. Membina hubungan yang baik dengan pihak pemilik barang ataupun pihak-pihak yang terkait seperti perusahaan forwarding, perusahaan pelayaran, balai karantina, BPOM dan lain sebagainya. Karena dalam pengajuan dokumen impor membutuhkan dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak tersebut. Dengan membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak tersebut PT. Heru Rahayu akan semakin terbantu dan mudah dalam proses pengajuan PIB.
- g. Mengatasi masalah keterlambatan respon dengan cara datang langsung ke KPBC. Dengan kendala lambatnya respon maka PT. Heru Rahayu Surabaya mengambil cara dengan datang langsung ke KPBC dan memberitahukan kepada pejabat yang mengurus PIB

bahwa pihak PT. Heru Rahayu Surabaya sudah mengirimkan pemberitahuan akan tetapi belum mendapatkan respon. Hal ini menuntut akan kecepatan dan ketepatan kerja yang harus didapatkan untuk menghindari denda *demurage* atau penambahan biaya penumpukan atas barang impor.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa simpulan yang dapat disimpulkan mengenai pemanfaatan sistem EDI guna mengetahui efektifitas dan efisiensi kerja pada PT. Heru Rahayu Surabaya. Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Sistem *Electronic Data interchanng* (EDI) Pabean dibutuhkan oleh perusahaan PT. Heru Rahayu Surabaya, untuk mempermudah penyerahan data dan dokumen pabean terutama dokumen PIB dalam kegiatan *customs clearance* kepada pihak Bea dan Cukai. Selain itu juga menghemat penggunaan waktu, biaya operasional serta penggunaan kertas dalam perusahaan.
2. Adapun faktor penghambat atau kendala yang terdapat pada PT. Heru Rahayu Surabaya seperti terjadinya *human errors*, lambatnya respon, koneksi internet. Yang pada dasarnya disebabkan oleh kekurangan SDM yang kompeten dalam pengoprasian penggunaan sistem EDI, maupun *trouble* dari pihak KPBC dan belum didukung oleh kesiapan pihak-pihak instansi terkait dalam sistem *on-line*.
3. Dengan adanya upaya yang ditempuh oleh PT. Heru Rahayu Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penyerahan dokumen PIB dengan sistem EDI, maka dapat dilihat pekerjaan penyerahan data dan dokumen PIB sudah lebih efektif dan efisien dan menuju kepada manfaat dari sistem EDI itu sendiri.

Sebagai langkah perbaikan di masa mendatang, penulis menyarankan beberapa hal yang diharapkan dalam pemanfaatan sistem EDI dapat berjalan secara optimal, maka untuk menghindari hal-hal tersebut diatas dapat melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Untuk menghemat pengeluaran perusahaan, sebaiknya SDM yang sudah diberikan pelatihan penggunaan EDI diawasi secara berkala untuk mengurangi *human errors* atau kesalahan-kesalahan lainnya.
2. PT. Heru Rahayu dapat *meng-upgrade* fasilitas penunjang seperti komputer dan internet guna mendukung sistem EDI.
3. Pihak DJBC memberikan fasilitas sejenis EDI kepada instansi terkait seperti karantina, BPOM dan yang lainnya, sehingga pekerjaan penyerahan data dan dokumen PIB melalui sistem EDI akan lebih efektif dan efisien, dan dapat mengurangi kelemahan dalam sistem yang digunakan oleh PT. Heru Rahayu Surabaya dan pengguna jasa lainnya pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

- [2]. Ali Purwito dan Indriani, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan. Mitra Wacana Media, Yogyakarta, 2016
- [3]. Indriani, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan, 2015
- [4]. Modul Pelatihan Penggunaan Modul Perusahaan PIB (BC2.0) PEB (BC3.0), PT. EDI Indonesia, 2016
- [5]. Capt. R.P.Suyono, Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut, Penerbit PPM, Jakarta, 2007
- [6]. Sutarto, Efektifitas Kerja Definisi Faktor Yang Mempengaruhi dan Alat Ukur Efektifitas Kerja, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1978
- [7]. Moleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007

